

Catatan diskusi Kepo Jurnal #2: Kota yang menyambut pengungsi¹

Dalam Kepo Jurnal bulan ke-2 kali ini, tim Urban Refugees membahas 2 dokumen yang terkait dengan kota, urban agenda dan urban refugees, yaitu:

1. *“Cities Welcoming Refugees and Migrants”* oleh UNESCO (2016), yang bisa diunduh di [sini](#).
Dokumen ini berisi tentang pendekatan yang diambil oleh beberapa jaringan pemangku kepentingan di Eropa, seperti ECCAR, EURO CITIES, the Global Mayoral Forum, dll dan kota-kota yang menjadi anggota jaringan tersebut yang memiliki agenda spesifik untuk menjadi kota yang menerima kedatangan pengungsi (Translasi dokumen, pg. x)
2. Habitat III Issue Papers No.2 tentang *“Migration and Refugees in Urban Areas”* oleh UN (2015), yang bisa diunduh di [sini](#).
Dokumen ini berisi rangkuman informasi terkait pengungsi dan pencari suaka yang menjadi dasar dalam pembahasan isu tersebut dalam UN Conference on Housing and Sustainable Urban Development, atau yang dikenal sebagai Habitat III, di Quito tahun 2016.

Kepo Jurnal yang berlangsung hari Sabtu, 13 Oktober 2018, memberi pencerahan pada tim Uref terkait beberapa hal, seperti terangkum dalam catatan diskusi berikut.

(1) Berbeda dengan Asia, banyak kota di Eropa sudah memiliki kerangka untuk menghadapi pengungsi, baik kerangka internasional yang melibatkan negara Eropa dan non-Eropa, di tingkat Eropa itu sendiri (Uni Eropa), di tingkat nasional, hingga ke tingkat kota. Di Asia, masih banyak negara yang masuk dalam kategori berkembang, sehingga tiap negara masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar warga negara sendiri. Tidak ada kerangka khusus, masih sedikit negara yang mengakui Konvensi Refugee 1951, masih banyak negara yang memiliki masalah HAM, sehingga terlihat perbedaan mendasar yang cukup besar dengan kasus kota di Eropa.

(2) Bahan bacaan ini memberi gambaran tentang pentingnya data, di mana banyak ketidaktahuan adalah karena tidak ada data yang tersedia.

- Banyak jaringan kota-kota yang membuka kesempatan untuk berbagi pengetahuan
- Data seharusnya bisa diakses oleh pemerintah kota juga, tidak hanya oleh pemerintah nasional aja

(3) Secara umum, pengungsi dianggap sebagai masalah nasional, padahal pada kenyataannya, kotalah yang langsung berhadapan dengan masalah pengungsi. Di era desentralisasi, kota seharusnya sudah bisa menjadi pemimpin dalam kebijakan kota masing-masing. Namun,

- Banyak data sektoral dasar, misalnya data disabilitas dan sektor informal, yang masih belum tersedia dan belum dimasukkan dalam analisis perencanaan kota, apalagi data terkait pengungsi
- Kota salah satunya terbentuk dari migrasi dan konsentrasi orang yang bermigrasi ke kota itu. Sehingga, seharusnya perencanaan kota itu memperlakukan semua orang yang tinggal di kota itu dengan setara, baik pengungsi maupun bukan. Di sisi lain, hal terkait dengan hak, dengan pengungsi asing dianggap tidak memiliki hak karena bukan warga negara itu.
- Pada dasarnya, masalah kota dengan atau tanpa adanya pengungsi tidak terlalu jauh berbeda, kecuali bahwa masalah dasar pengungsi adalah berkaitan dengan hak dan kewarganegaraan. Di Indonesia, sebagaimana di banyak negara, penyediaan pelayanan dasar adalah berbasis kewarganegaraan, jadi susah bagi kota untuk menjustifikasi (secara legal) penyediaan pelayanan dasar untuk pengungsi, kecuali bila pemimpin kota berani mengambil keputusan mandiri berdasarkan konsep desentralisasi.

¹ Pengungsi dalam tulisan ini mencakup pengungsi dan pencari suaka (refugees and asylum seeker)

- Juga perlu dicatat bahwa pemimpin kota memperhatikan preferensi pemilih (voters), dimana banyak pemilih yang menolak pengungsi
- Kepemimpinan kota (city leadership) juga dapat bergantung pada image/brand seperti apa yang ingin dibangun oleh kota tersebut. Misalnya, suatu kota berhasil membangun imej yang '*diverse*' (*welcoming diversity*) melalui program-program kota, maka '*diversity*' dapat menjadi branding kota tersebut, yang selanjutnya membentuk identitas kota itu. Artinya, kota dapat merekonstruksi identitasnya sebagai kota global/internasional. Contoh: Makassar melalui banyaknya festival internasional, atau Bandung yang dikenal sebagai kota kreatif.
- Melihat tren pembangunan di Indonesia, ada kemungkinan di masa depan kota tidak harus selalu mengikuti kebijakan nasional asalkan sesuai dengan konteks lokal dan ada komitmen dari pemerintah kota untuk misalnya menyediakan layanan bagi penduduknya. Contoh yang mulai terlihat adalah dalam penataan daerah kumuh di kota-kota yang dilalui sungai, contoh: Banjarmasin.

(4) Terkait dengan survey ke kota-kota untuk menerima pengungsi dalam dokumen pertama, dipahami bahwa respon kota sangat tergantung pada sumber daya yang ada di kota masing-masing, sehingga hasilnya sangat bervariasi

- Masalah dalam survey ini adalah adanya istilah dan definisi yang beda di tiap kota, misalnya tentang penggunaan atau irisan penggunaan istilah "*foreign born individuals*", "*undocumented refugees*", dll
- Semakin besar dan ramai suatu kota, maka akan semakin mungkin kota itu menjadi tujuan (*destination*) karena adanya daya tarik ekonomi dan pasar tenaga kerja